

ABSTRAK

Sistem multi partai yang dianut Indonesia menjadikan partai politik untuk berkoalisi. Hal tersebut disebabkan oleh kesulitan untuk mencapai suara mayoritas pada saat pemilihan umum. Selain itu, adanya syarat ambang batas pencalonan yang disebut *President Threshold* juga menjadi pertimbangan elite politik untuk menjalin kerja sama dengan elite politik dari partai lain. Koalisi partai ini bergerak secara dinamis di Indonesia, partai yang sebelumnya berkoalisi bisa jadi bersebrangan pada Pemilu berikutnya dilatar belakangi berbagai hal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana proses pembentukan koalisi partai pada Pemilu Presiden 2019 dengan menggunakan teori jaringan dari Weick dan Taylor, Teori Koalisi Cheibub dan konsep Analisa Jaringan Komunikasi berbasis dokumen. Penggunaan konsep ini dikarenakan dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah Laporan Utama Majalah Tempo. Penelitian ini dianalisis dengan cara kuantitatif menggunakan metode jaringan komunikasi dan di paparkan secara deskriptif untuk menjelaskan bagaimana proses pembentukan koalisi partai dengan menggunakan jaringan komunikasi. Hasil penelitian jaringan komunikasi elite politik dalam pembentukan koalisi partai pemilu Presiden 2019 pada Laporan Utama Majalah Tempo menunjukkan bahwa, praktik komunikasi berpusat pada aktor tertentu. Aktor utamanya adalah Jokowi dan Prabowo sebagai calon Presiden pada laga Pemilu Presiden 2019. Adanya pemusatan jalur komunikasi ke Jokowi dan Prabowo membuat mereka memiliki keuntungan atas keleluasaan dalam menjalin komunikasi dengan aktor lain dalam jaringan. Selain itu, dalam menjaring partai lain untuk bergabung dalam koalisi tidak dilakukan atas dasar musyawarah dengan semua anggota koalisi karena elite politik cenderung menjajaki kemungkinan berkoalisi dengan partai lain satu persatu.

Kata kunci : Koalisi, Elite Politik, Jaringan Komunikasi, Pemilu Presiden 2019.

ABSTRACT

The multi-party system that is embraced by Indonesia cause politics party to make a coalition. That is caused by difficulties to achieve the majority of voices in the general election. Aside from that, the nomination threshold policy that called the President Threshold also became a consideration for the elite politics to work together and make a coalition with other political elite or with other parties. The party coalition is dynamically in Indonesia, the party who do a coalition before can be opposed to each other in the next election, caused by many things. Therefore, this research aims to learn about the coalition process in the 2019 President Election using the Network Theory by Weick and Taylor, Coalition Theory by Cheibub, and the communication network analysis base on document concept. the application of this concept is because the data of this research is from Laporan Utama Majalah Tempo. This research is analyzed using a quantitative way of communication network method and explained descriptively on the party coalition process. The research results for the communication network of the political elite in party coalition on the 2019 president election shows that, communication practice centered on a certain actor. The main actors are Jokowi and Prabowo as the presidential candidates for the 2019 election. The concentration of the communication lane on Jokowi and Prabowo made them have the advantage of flexibility in establishing communication with other actors in the network. Other than that, in the networking with other parties to join in the coalition was not done by a discussion with all the coalition members because politics elite tend to explore possibilities of a coalition with another party one by one.

keywords: Coalition, Politic Elite, communication Network, 2019 President Election